

Agama dan Kekuasaan

Tinjauan Transkeilmuan dan Kritik Ideologi

Oleh Reza A.A Wattimena

Dr. der Phil. Reza Alexander Antonius Wattimena. *Peneliti di bidang Filsafat Politik, Filsafat Ilmu dan Kebijaksanaan Timur. Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Pernah mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Universitas Airlangga, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Presiden dan di Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Beberapa karyanya: Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Zen dan Jalan Pembebasan (2017-2018), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), Cosmopolitanism in International Relations (2018) dan berbagai karya lainnya di surat kabar, website, jurnal ilmiah maupun buku.*

Abstrak

Tulisan ini hendak memahami hubungan antara agama dan kekuasaan. Di satu sisi, pada dirinya sendiri, agama adalah sebetulnya kekuasaan yang bisa mengatur hidup banyak orang. Di sisi lain, agama kerap menjadi pembenaran bagi kekuasaan yang ada, walaupun ada unsur ketidakadilan di dalamnya. Untuk mendalami hal ini dibutuhkan pandangan yang melintasi berbagai disiplin ilmu, mulai dari filsafat, politik, budaya sampai dengan kajian agama. Tulisan ini juga dapat dilihat sebagai sebetulnya kritik ideologi yang hendak melucuti isi ideologis dari agama, sehingga ia bisa kembali menjadi terang bagi hidup manusia, dan bukan sekedar alat politik, seperti yang sekarang ini terjadi di Indonesia. Tulisan ini juga berusaha memahami hubungan antara agama dan kekuasaan di Indonesia.

Kata-kata kunci: Agama, Kekuasaan, Ideologi, Hegemoni, Wacana, Panopticon

Agama adalah salah satu ajaran pengikat manusia. Orang-orang dengan berbagai latar belakang, cara berpikir dan pola perilaku bisa hidup di bawah payung ajaran yang sama, berkat adanya agama. Agama menawarkan tata nilai yang bisa membawa orang pada kehidupan yang paripurna. Agama juga menawarkan harapan, ketika penderitaan hidup dan kematian akan datang berkunjung. Di tengah hidup yang semakin tidak pasti, akibat keadaan politik dan ekonomi dunia yang terus bergejolak, agama menjadi pegangan banyak orang.

Di satu sisi, agama juga adalah sebetulnya kekuasaan. Ia mengatur hidup banyak orang di dalam payung ajarannya. Di sisi lain, terutama di abad 21, agama menjadi alat kekuasaan untuk mengumpulkan massa. Ajaran-ajaran agama dipelintir sedemikian rupa, sehingga ia membenarkan aliran politik tertentu. Bahkan, korupsi dan penipuan masyarakat pun seringkali mencari pembenaran dari agama, supaya ia tidak ditinggalkan masyarakat luas.

Agama juga tak bisa dipahami dengan satu keilmuan semata, misalnya teologi. Teologi, sebagai ilmu, berpijak pada tradisi agama tertentu, dan menggunakan iman kepercayaan sebagai dasarnya. Ini tentu tidak bisa digunakan untuk memahami agama sebagai fenomena sosial, politik, budaya dan filosofis yang mempengaruhi hidup banyak orang. Maka dari itu, pendekatan transkeilmuan menjadi amat penting, yakni pendekatan yang melampaui sekat-sekat keilmuan, dan melihat fenomena apa adanya.¹

Pendekatan transkeilmuan ini dipadukan dengan kritik ideologi. Dalam arti ini, ideologi memang memiliki beragam arti. Namun, satu arti terus muncul, yakni ideologi sebagai kesalahan berpikir yang mengaburkan pandangan orang tentang dunia, sehingga ia tidak bisa sampai pada kebenaran. Ideologi perlu terus mendapat kritik, supaya masyarakat tidak terjebak pada kesalahan berpikir yang berujung pada kesalahan pengambilan keputusan, sehingga merugikan banyak pihak. Dalam arti ini, tulisan ini adalah sebuah kritik ideologi terhadap agama, terutama sebagaimana ia dipahami di Indonesia.

Pemahaman ini amat penting di Indonesia untuk dua tujuan. Pertama, radikalisme agama adalah masalah penting yang harus dihadapi saat ini di Indonesia. Ajaran yang sangat sempit dari tanah asing memaksakan dirinya untuk masuk ke

¹ Lihat (Wattimena, Rumah Filsafat 2019) tentang merobohkan tembok-tembok keilmuan.

Indonesia, dan mempengaruhi rakyat yang tak kritis cara berpikirnya. Karena mutu pendidikan yang amat rendah, rakyat pun begitu mudah dipengaruhi. Radikalisme tidak hanya menyebabkan konflik dan tegangan semakin besar di masyarakat, tetapi bisa berkembang menjadi terorisme yang berpijak pada agama, sehingga mengancam keutuhan bangsa.²

Dua, pemahaman transkeilmuan dan kritik ideologi atas agama juga penting, supaya agama tidak dilihat melulu sebagai sesuatu yang suci, lepas dari kesalahan-kesalahan yang mungkin dibuat oleh manusia. Sikap naif terhadap agama ini amat merugikan. Agama lalu dengan mudah dipelintir untuk mengabdikan pada kepentingan politik dan ekonomi yang tidak jujur. Jika politik dan ekonomi dicampurkan dengan agama, seperti yang banyak terjadi di Indonesia, maka ketiganya akan membusuk. Pembusukan ini, terutama dalam soal agama, tampak dalam tiga hal.

Pertama, pembusukan agama menjadikan agama sebagai pembenaran untuk kemalasan berpikir. Orang percaya begitu saja secara buta, hanya karena mendengar kata agama. Ini membuat orang mudah dicuci otak dan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan busuk yang menggunakan nama agama. Dua, pembusukan agama membuat agama menjadi pembenaran untuk bersikap tidak adil, terutama terhadap orang-orang yang berbeda dan kaum minoritas. Persoalan diskriminasi terhadap kaum minoritas masih menjadi masalah besar di Indonesia.

Tiga, pembusukan agama juga bisa mempengaruhi pilihan politik. Di dalam demokrasi, kemampuan rakyat untuk membuat keputusan secara jernih dan masuk akal amatlah penting. Ketika pembusukan agama mempengaruhi cara berpikir rakyat, sehingga bersifat sempit dan penuh dengan konflik, maka demokrasi pun terganggu.³ Pilkada Jakarta 2017 menjadi contoh nyata dalam hal ini. Ketika politik kekuasaan yang korup menggunakan jubah agama, maka keduanya akan menjadi busuk. Konflik dan perpecahan pun tak terhindarkan.

Pemahaman tentang hubungan antara agama dan kekuasaan juga membantu di dalam mewujudkan kebaikan bersama. Di abad 21, politik memang tak bisa dipisahkan dengan agama. Agama bisa menjadi penyumbang nilai-nilai moral yang berharga terhadap politik, asalkan ia bisa menerjemahkan ide-idenya ke dalam

² Lihat (B. A. Reza A.A Wattimena 2018)

³ Tentang demokrasi dan krisis demokrasi, lihat (Wattimena, *Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya* 2016)

bahasa yang bisa dimengerti semua orang, baik oleh orang beragama lain, maupun oleh kaum ateis.⁴ Proses menerjemahkan ini memang mengandaikan banyak hal, termasuk mutu pendidikan yang tinggi di masyarakat. Hanya dengan begini, agama bisa menjadi pilar kebaikan bersama, sesuai dengan tujuan keberadaannya.

Tulisan ini akan di bagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama mengupas hubungan antara agama dan kekuasaan. Pemikiran-pemikiran Karl Marx, Antonio Gramsci, Malory Nye, Louis Althusser, Michel Foucault sekaligus karya-karya penulis (Reza A.A Wattimena), yang telah diterbitkan sebelumnya, menjadi acuan utama di dalam bagian ini. Bagian kedua merupakan upaya untuk menerapkan kerangka berpikir tulisan ini ke dalam konteks Indonesia. Tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan.

1. Agama dan Kekuasaan: Tinjauan Transkeilmuan

Agama dan kekuasaan adalah dua hal yang tak langsung tampak terhubung. Banyak orang masih mengira, bahwa agama hanya terkait dengan kebaikan dan kesucian. Tidak ada politik di dalamnya, terutama politik terkait dengan pertarungan dan perebutan kekuasaan. Pandangan ini tentunya bertentangan dengan kenyataan, dan berbagai peristiwa di dalam sejarah manusia.⁵ Bahkan, Karl Marx menyatakan, bahwa agama justru diciptakan oleh penguasa demi kepentingan kekuasaan, guna mengontrol rakyatnya. Agama membuat rakyat menjadi tenang dan pasif, sehingga sang penguasa bisa tetap berkuasa, dan bahkan bisa memperbesar kekuasaannya.⁶

Ada beberapa pemikir yang kiranya bisa membantu menjelaskan hubungan antara agama dan kekuasaan. Mereka adalah Karl Marx, Antonio Gramsci, Louis Althusser dan Michel Foucault. Sama dengan budaya, agama dan kekuasaan adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan begitu saja. Dalam hal ini, mengikuti Marx, kita bisa melihat masyarakat dalam terang teori kekuasaan, yakni dalam soal hubungan-hubungan sosial dan pengaruh kekuasaan di dalamnya. Marx berulang kali menegaskan, bahwa hubungan-hubungan ekonomi merupakan penentu dasar bentuk sebuah masyarakat.

⁴ Lihat (Reder 2014)

⁵ Kerangka mengikuti (Nye 2008)

⁶ Lihat (Magnis-Suseno 1999) dan (Wattimena 2019)

Di dalam masyarakat kapitalistik, seperti di berbagai belahan dunia dewasa ini, ekonomi ditandai dengan kesenjangan yang amat besar antara sang pemilik sumber daya ekonomi, dan yang tidak. Pemilik sumber daya ekonomi disini adalah pemilik alat-alat produksi, seperti pabrik dan pelayanan jasa. Merekalah penguasa sesungguhnya di dalam masyarakat kapitalistik. Dengan kekuatan semacam ini, mereka bisa mengontrol orang-orang lainnya, yakni kelas pekerja. Mereka bahkan menggunakan kekuasaannya untuk memeras jerih payah kelas pekerja. Inilah pola produksi di dalam masyarakat kapitalis.

Masyarakat pun terbelah menjadi dua, yakni kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Mereka berada dalam keadaan tegang terus menerus, karena kelas pemilik modal memperoleh keuntungan persis dengan memeras kelas pekerja. Jalan keluarnya, menurut Marx, adalah dengan merebut alat-alat produksi dari kelas pemilik modal. Untuk bisa melakukan itu, kelas pekerja harus mengorganisir dirinya. Pandangan ini dituangkan oleh Marx dalam bukunya yang ditulis bersama Friedrich Engels dengan judul *The Communist Manifesto*.⁷ Filsafat berperan penting disini, tidak hanya untuk memahami dunia, tetapi juga untuk mengubahnya. Pandangan Marx ini berpengaruh sangat besar di abad 19, sampai sekarang ini.

Di dalam ranah kajian agama, pemikiran Marx juga masih memiliki pengaruh besar. Bagi Marx, agama adalah opium dari masyarakat luas. Artinya, masyarakat menciptakan agama, supaya mereka bisa bertahan di tengah beragam penindasan dan ketidakadilan yang terjadi. Pada dirinya sendiri, agama tidaklah baik atau buruk. Namun, dalam konteks masyarakat yang lebih luas, yang kerap kali diwarnai penindasan dan ketidakadilan, agama berperan besar di dalam pelestarian keadaan semacam itu. Caranya adalah dengan membalut ketidakadilan dan penindasan yang terjadi dengan cerita-cerita yang menyejukan hati, seperti cerita tentang surga setelah kematian. Tanpa agama, masyarakat akan melihat ketidakadilan dan penindasan dengan lebih jelas. Mereka pun akan lebih terdorong untuk mengubah keadaan tersebut.

Dalam arti ini, agama adalah ideologi, yakni kesadaran palsu (*falsches Bewusstsein*). Ideologi adalah upaya untuk mengaburkan kenyataan, sehingga kebenaran menjadi tertutup oleh kepalsuan. Di dalam ajaran banyak agama,

⁷ Lihat (Karl Marx 1888)

kenyataan dan kehidupan pada umumnya dilihat sebagai kenyataan yang sudah diciptakan oleh tuhan. Maka dari itu, semua baik adanya, walaupun terdapat ketidakadilan dan penindasan di dalamnya. Ini membuat agama seakan mendiamkan, dan bahkan menyetujui, keadaan penuh penindasan tersebut. Dalam arti inilah Marx menyatakan, bahwa agama menjadi salah satu tantangan bagi perubahan menjadi masyarakat yang lebih adil dan bebas. Ini jugalah yang merupakan inti dari pandangan Marx, bahwa agama merupakan opium dari masyarakat luas.⁸

Perlu juga ditekankan, bahwa bagi Marx, tidak semua unsur dari agama adalah ideologi. Namun, ketika agama digunakan untuk memenuhi kepentingan politik praktis, maka ia sudah jatuh ke dalam ideologi.

Dalam konteks ini, walaupun tak selalu terlibat dengan kepentingan politik praktis, agama tetap tak akan pernah sepenuhnya bebas dari hubungan-hubungan kekuasaan (*Machtsverhältnisse*) di dalam masyarakat. Secara tidak langsung, seperti sudah ditegaskan sebelumnya, agama menjadi topeng yang membenarkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Agama menjadi pembenaran ideologis bagi struktur kekuasaan yang ada, yang melestarikan kesenjangan sosial.

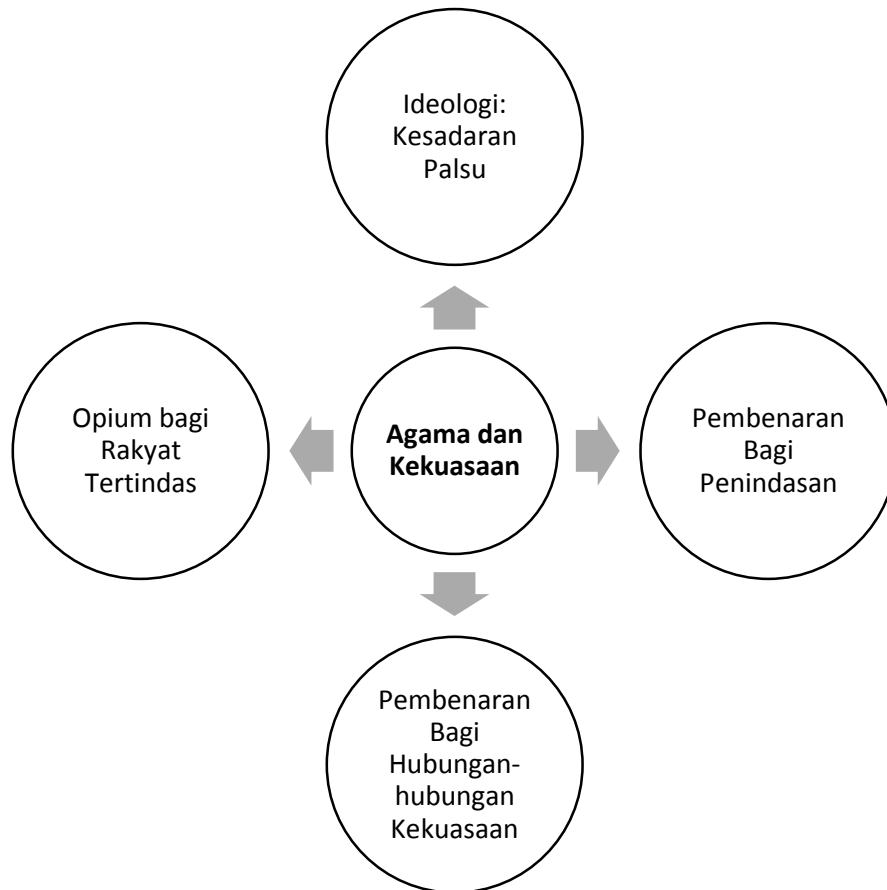
Marx dan Engels lebih jauh menulis, bahwa agama adalah “hembusan nafas dari mahluk yang tertindas, hati dari dunia yang tanpa hati... agama adalah opium dari rakyat.”⁹ Memang tetap harus ditegaskan, bahwa keadaan masyarakat yang penuh ketidakadilan dan penindasan bukanlah akibat dari keberadaan agama. Namun, agama adalah tanda dari masyarakat yang memiliki sistem sosial yang buruk, dimana ketidakadilan dan kesenjangan sosial begitu tinggi. Agama menjadi ciri dari masyarakat yang menyembunyikan penindasan terhadap rakyatnya oleh sekelompok orang yang menguasai sumber-sumber ekonomi. Marx tidak berpendapat, bahwa agama harus dilenyapkan. Hanya ketika keadaan masyarakat sudah bebas dari penindasan dan kesenjangan sosial, maka agama, terutama ciri ideologisnya, akan lenyap dengan sendirinya.

Bagan 1.

⁸ Lihat (Nye 2008)

⁹ (Karl Marx, On Religion 1888)

Hubungan Agama dan Kekuasaan Menurut Marx¹⁰



Satu hal yang perlu dipastikan adalah, bahwa agama itu kompleks, dan memiliki banyak sisi yang berbeda. Ciri ideologis yang mendiamkan, dan bahkan membenarkan ketidakadilan, jelas ada dalam agama. Namun, agama juga memiliki ciri pembebasan yang mendorong terciptanya perdamaian dan keadilan sosial. Agama juga memiliki ciri penyatu yang membuat orang-orang dari berbagai latar belakang bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.¹¹ Tidak hanya itu, sasaran kritik Marx yang terutama adalah agama Kristen. Kritiknya tentu tidak berlaku di hadapan agama-agama besar lainnya, seperti Hindu dan Buddha.¹² Kedua agama

¹⁰ Bagan hasil rumusan penulis

¹¹ Lihat (Harari 2011)

¹² Lihat (Wattimena, "Wake Up and Live": The Roots of Cosmopolitanism in Oriental Worldview 2017)

tersebut memiliki dasar metafisis dan ciri kosmologis yang amat berbeda dengan agama-agama Timur Tengah.

Hal lainnya yang menjadi titik lemah Marx adalah pandangannya, bahwa ekonomi merupakan dasar utama yang menentukan bentuk sebuah masyarakat. Atas dasar itu, Marx lalu melihat masyarakat sebagai sebuah tempat pertentangan kelas (*Klasssenkampf*) yang abadi, yakni antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Yang lebih menentukan sebuah masyarakat bukanlah ekonomi dan pemegang alat-alat produksi, melainkan pola komunikasi yang berlangsung di dalam masyarakat tersebut. Jika pola komunikasi diwarnai oleh feodalisme dan diskriminasi, maka ketidakadilan akan tercipta.¹³ Maka, pertentangan kelas ekonomi juga bukan merupakan ciri universal masyarakat, melainkan pertentangan antara kelas penindas dan kelas tertindas. Di titik ini, perjuangan hak-hak kaum perempuan dan LGBTQ bukanlah semata perjuangan kelas, tetapi perjuangan untuk memperoleh pengakuan yang selayaknya (*Kampf um Anerkennung*).¹⁴ Lepas dari kritik ini, peran ideologis agama sebagai pembenaran bagi ketidakadilan tetap bisa menjadi perhatian.

Kritik Marx terhadap agama dilanjutkan oleh seorang pemikir Marxis lainnya yang bernama Antonio Gramsci. Ia adalah seorang pemikir Italia yang berkarya pada era 1930-an. Ia merumuskan konsep untuk memahami peran ideologi di dalam pertentangan kelas yang terjadi di masyarakat. Ada sesuatu yang lebih rumit dan halus terjadi di dalam penindasan yang dilakukan oleh kelas pemilik modal terhadap kelas pekerja. Unsur yang lebih halus dan rumit inilah yang tidak ditemukan di dalam analisis Marx terhadap agama.

Bagi Gramsci, masyarakat memang terbelah menjadi dua. Di satu sisi, ada sekelompok kecil kelas elit yang memiliki sumber daya besar untuk menguasai masyarakat. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat terdiri dari kelas pekerja yang tak menguasai sumber daya ekonomi tertentu. Kelas yang satu menindas kelas lainnya. Namun, penindasan tidak akan terjadi, tanpa adanya secuil persetujuan di dalamnya, sehingga penindasan tersebut tampak alamiah. Marx menjelaskan, bahwa agama menjadi “alat persetujuan” tersebut. Gramsci mencoba menelaah soal ini lebih dalam.

Konsep kunci di dalam pemikiran Gramsci adalah hegemoni. Konsep ini mengacu pada beragam cara yang kompleks, yang digunakan oleh penguasa untuk

¹³ Lihat (Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik* 2007)

¹⁴ Lihat (Wattimena, *Zwischen kollektivem Gedächtnis, Anerkennung und Versöhnung* 2016)

membuat orang yang ditindas menerima, dan bahkan mendukung, penindasan yang mereka alami. Dengan kata lain, pihak yang tertindas merasa memiliki andil di dalam proses penindasan yang terjadi. Caranya dengan menciptakan sebuah budaya dominan baru dari sisi penguasa, dan kemudian dipaksakan kepada pihak yang ditindas, sehingga mereka melihatnya juga sebagai budaya mereka.

Tentu saja, budaya lain masih ada, misalnya budaya lama dari pihak yang tertindas. Namun, budaya tersebut dilihat sebagai budaya yang lebih rendah, daripada budaya penguasa. Disini terjadi penindasan melalui budaya yang akan menghasilkan masyarakat yang terbelah dua, yakni penguasa dan yang tertindas. Namun, pihak yang tertindas akan melihat penindasan sebagai sesuatu yang lumrah, karena diperkenalkan dengan budaya baru yang dianggap lebih tinggi. Budaya ini kemudian tersebar dan dilestarikan melalui sekolah, agama dan berbagai institusi pembentuk pengetahuan lainnya.

Kelompok yang ditindas kerap disebut juga sebagai kelompok subaltern. Tentu saja, budaya mereka tidak langsung hilang. Dalam beberapa hal, mereka bisa melestarikan budaya mereka, walaupun tidak di dalam ranah yang langsung terkait dengan politik kekuasaan. Kelompok subaltern juga bisa mengambil budaya penguasa menjadi budaya mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka juga bisa memperoleh kekuasaan, dan menjadi bagian dari kelas yang berkuasa. Mereka menjadi penindas terhadap kelompoknya sendiri. Dalam arti inilah budaya menjadi alat hegemoni penguasa.¹⁵

Contoh paling jelas adalah kolonialisme Belanda terhadap Indonesia. Beberapa kelompok masyarakat Indonesia mengambil alih budaya Belanda, supaya mereka memiliki status sosial lebih tinggi di masyarakat. Dengan cara ini, mereka ikut ambil bagian dalam proses penjajahan, dan pelestarian penjajahan yang ada. Ini paling jelas di dalam penggunaan bahasa. "Seluruh bahasa", demikian tulis Gramsci, "adalah proses metafor yang berkelanjutan, dan sejarah semantik adalah cerminan dari sejarah sebuah kebudayaan. Bahasa adalah pada saat yang sama sesuatu yang hidup dan sekaligus museum dari fosil-fosil kehidupan dan peradaban."¹⁶ Dengan kata lain, bahasa adalah identitas. Ketika bahasa lokal mulai berkurang penggunaannya, atau bahkan tidak digunakan lagi, maka bahasa dari budaya yang dominan akan

¹⁵ Lihat (Gramsci 1971)

¹⁶ (Gramsci 1971)

semakin kuat. Bahasa akan menjadi kekuatan hegemonik untuk menyerap budaya yang lemah, sekaligus memperkuat budaya penguasa. Kematian bahasa, seperti diungkap oleh Noam Chomsky, adalah kematian sebuah budaya.¹⁷

Kematian sebuah agama memiliki pola yang serupa juga. Ketika agama lokal lenyap, karena ditekan oleh agama penguasa dan penjajah, maka sebuah budaya juga mati. Di dalam sejarah, agama Kristen kerap kali dikaitkan dengan pola ini. Melalui penjajahan, negara-negara Eropa, dan kini Amerika Serikat, menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Dalam arti ini, agama Kristen adalah bagian dari budaya penguasa yang bersifat hegemonial. Orang-orang non Eropa dan Amerika memeluk agama tersebut untuk menjadi bagian dari kelas penguasa. Memang, ada tanggapan kritis tentang hal ini, baik dari kelompok Kristen sendiri ataupun dari luarnya. Namun, fakta, bahwa agama Kristen telah menjadi agama hegemonik, tetap tak bisa dibantah.

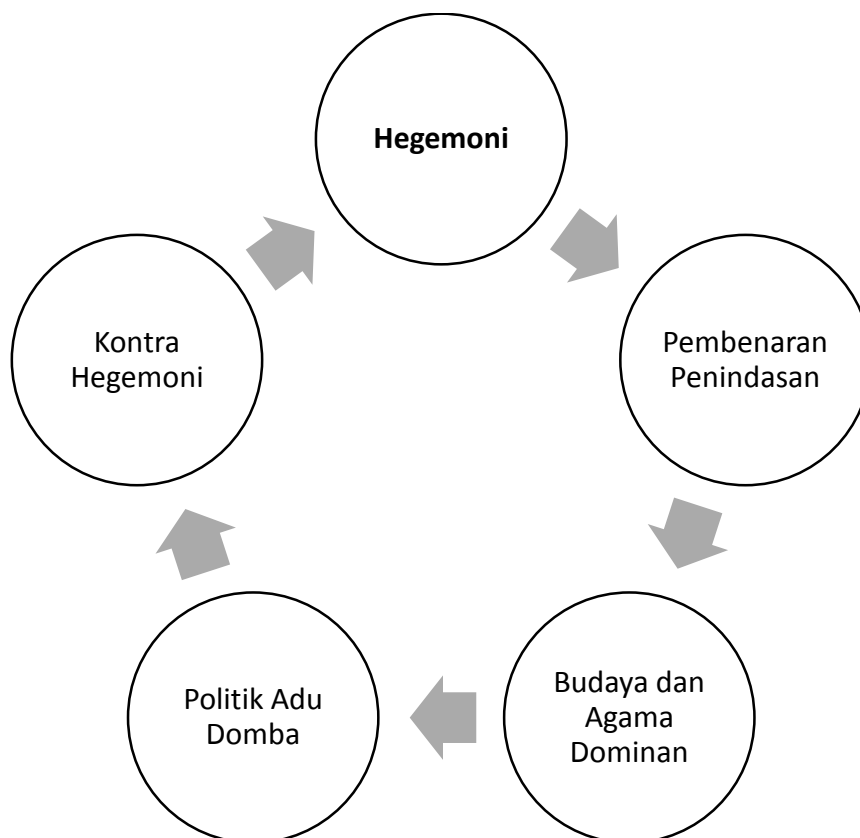
Gramsci juga menegaskan, bahwa hegemoni tidak akan pernah menjadi mutlak. Artinya, setiap bentuk hegemoni akan menghasilkan lawannya, yakni kontra-hegemoni.¹⁸ Penguasa pasti akan terus mendapat perlawanan dari pihak yang dikuasai. Agama juga bisa menjadi alat kontra-hegemoni. Di Timur Tengah, Islam dianggap sebagai upaya untuk melepaskan diri dari hegemoni Barat. Di belahan dunia lain, agama-agama lokal menjadi alat untuk melepaskan diri dari hegemoni Barat yang tersebar melalui proses globalisasi.¹⁹ Bahasa pun bisa menjadi alat untuk melakukan kontra-hegemoni. Pelestarian bahasa-bahasa lokal juga merupakan upaya pelestarian budaya, guna menanggapi arus globalisasi yang mempengaruhi seluruh dunia.

¹⁷ Lihat (Chomsky 2016)

¹⁸ Lihat (Gramsci 1971)

¹⁹ Tentang globalisasi bisa dilihat di (Wattimena, What are the Fundamental Pillars of Contemporary Globalization? July 2018 Volume 42)

Bagan 2.
Konsep Hegemoni Menurut Gramsci



Hegemoni tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga di dalam negara. Kelas penguasa hidup dengan budaya dan agama tertentu. Untuk bisa duduk di pemerintahan, atau memegang kekuasaan tertentu, orang harus memeluk budaya dan agama tersebut. Sudah bukan rahasia lagi, kedudukan Presiden di Indonesia hanya bisa dipegang oleh pria beragama Islam. Hal ini tidak tertulis resmi dalam undang-undang. Namun, sebagai sebetuk hegemoni, ia diikuti begitu saja, kerap kali tanpa sikap kritis. Dalam arti ini, hegemoni bisa menciptakan intoleransi terhadap

kelompok-kelompok lain di dalam masyarakat.²⁰ Hegemoni bisa menjadi bahan mentah untuk dimainkan di dalam politik identitas, guna menciptakan perpecahan di masyarakat.

Konsep Hegemoni yang dirumuskan Gramsci, dengan demikian, bisa dilihat sebagai upaya untuk membenarkan penindasan dan penjajahan dengan menggunakan ideologi serta agama, sehingga semua itu terlihat normal, bahkan baik adanya. Hegemoni adalah alat kekuasaan untuk memberikan legitimasi terhadap dirinya sendiri. Akibatnya, penindasan menjadi berlangsung lama dan dalam, bahkan menghancurkan budaya sebuah masyarakat. Tidak hanya itu, bahkan orang-orang yang tertindas juga bisa memeluk budaya dan agama hegemonik yang ada, serta ikut menindas rakyatnya sendiri. Akan tetapi, seperti ditegaskan oleh Gramsci, hegemoni selalu melahirkan lawannya sendiri.

Hubungan antara agama dan kekuasaan juga bisa dilihat di dalam kajian Louis Althusser, seorang pemikir Prancis di abad 20. Dasar dari pemikirannya juga adalah pandangan Marx tentang ideologi. Kiranya, ada dua hal yang menjadi fokus Althusser. Pertama, ia ingin memahami, bagaimana tatanan politik penguasa tertentu dipaksakan ke seluruh masyarakat. Dua, ia juga ingin memahami, bagaimana ideologi berperan di dalam kehidupan pribadi seseorang.²¹ Bagi Althusser, ideologi adalah ilusi yang dipandang sebagai kenyataan. Ia ingin memahami, bagaimana ideologi tercipta, sehingga diyakini banyak orang, walaupun itu justru menciptakan penindasan baru terhadap mereka. Dalam arti ini, ideologi, walaupun ilusi yang dipandang sebagai kenyataan, dapat dilihat sebagai inti dari kekuasaan politik itu sendiri.

Untuk menjelaskan ini, dia membedakan dua bentuk alat ideologis. Yang pertama adalah alat negara yang bersifat represif, seperti tentara, polisi, penjara, pengadilan dan pemerintahan itu sendiri. Mereka bertindak dengan kekuatan, ancaman dan kekerasan, guna mengontrol masyarakat. Yang kedua adalah alat negara yang bersifat ideologis, seperti media, sekolah, universitas, seni, keluarga dan agama. Dalam arti ini, agama adalah salah satu alat bagi negara untuk menguasai dan mengontrol warganya dengan jalan-jalan yang halus dan kompleks, sehingga warganya tunduk dengan sukarela terhadap kekuasaan negara tersebut.²²

²⁰ Tentang toleransi dan intoleransi lihat (Reza A.A Wattimena 2017)

²¹ Lihat (Althusser 1971)

²² Lihat (Nye 2008)

Memang, agama tidak memiliki tujuan langsung untuk melestarikan kekuasaan sekaligus ketidakadilan. Namun, karena dekat dengan kekuasaan, dan kerap digunakan oleh penguasa untuk membenarkan ketidakadilan, agama pun turut serta dalam pelestarian kekuasaan dan ketidakadilan yang ada. Sejarah kiranya juga menunjukkan hal itu. Di berbagai negara, agama dijadikan kekuatan simbolik untuk mengontrol rakyat. Tujuannya adalah harmoni di dalam negara, walaupun harmoni tersebut kerap membiarkan dan menyembunyikan berbagai persoalan yang ada. Di Eropa secara khusus, agama bahkan pernah ikut serta sebagai kekuatan represif negara, misalnya kehadiran inkuisisi yang punya kekuatan menghukum atas dasar ajaran agama Katolik.

Islam juga memiliki sejarah yang kurang lebih sama. Di tahun 1990an, Taliban menguasai Afganistan dengan memaksakan tafsirannya atas Islam ke dalam politik Afganistan. Dalam konteks ini, agama menjadi ideologi yang digunakan sebagai alat bagi Taliban untuk menguasai dan mengontrol Afganistan. Dalam konteks pemikiran Althusser, Islam dijadikan alat negara untuk kepentingan ideologis sekaligus represif untuk melestarikan kekuasaan Taliban di Afganistan. Ini semua dibarengi dengan ancaman, intimidasi dan kekerasan yang mengikutinya. Ini juga contoh, bagaimana agama bisa menjadi sekaligus alat ideologis dan alat represif di dalam ranah politik kekuasaan.

Althusser memang membedakan alat represif dan alat ideologis dari negara untuk menguasai dan mengontrol rakyatnya. Walaupun begitu, jika diperhatikan lebih dalam, keduanya sebenarnya dua sisi dari satu koin yang sama. Seperti sudah disinggung sebelumnya, contoh paling jelas mungkin adalah agama. Sebagai bagian dari alat ideologis negara, agama juga berperan aktif di banyak tempat sebagai alat represif negara yang memiliki kekuatan untuk mengancam dan menghukum. Dengan berkembangnya sekularisme, yang menempatkan agama ke dalam ruang privat, agama pun terdorong menjadi semata alat ideologis negara yang melepaskan kekuasaan represifnya.

Tentang agama sebagai alat ideologis negara, Althusser menekankan, bahwa ini semua terjadi melalui proses yang sangat halus dan kompleks. Orang-orang yang hidup dalam ideologi merasa diri bebas, walaupun mereka hidup dalam penindasan struktur kekuasaan tertentu. Orang mengambil alih pola pikir dan kebiasaan hidup tertentu dari struktur kekuasaan yang ada, dan melihatnya sebagai miliknya sendiri.

Inilah yang disebut kebebasan di dalam penjara.²³ Althusser memiliki istilah khusus untuk hal ini, yakni interpelasi (*interpellation*). Ini adalah proses, dimana orang hidup dalam penindasan ideologi tertentu, namun tetap merasa bebas.

Ideologi membuat sesuatu yang tak biasa menjadi seolah biasa. Ia membuat sesuatu yang, dalam keadaan tertentu, terlihat aneh, bahkan jahat, menjadi seolah hal yang biasa.²⁴ Sejatinya, setiap orang lahir selalu ke dalam sebetuk ideologi tertentu, sampai ia sadar. Kehidupan sosial itu sendiri, pada hakekatnya, adalah sebetuk ideologi, atau interpelasi. Bahkan, keinginan untuk menjadi bebas dan sadar juga adalah sebetuk interpelasi tertentu, sehingga ia terlihat sebagai sesuatu yang alamiah. Dengan pandangan ini, Althusser menghancurkan segala pandangan tentang kebebasan, serta kemungkinan manusia untuk lepas dari ideologi. Ini juga memicu perdebatan di dalam filsafat ilmu-ilmu sosial tentang hubungan antara manusia dengan struktur sosial.²⁵

Sebelumnya, Gramsci menegaskan, bahwa hegemoni selalu melahirkan lawannya sendiri, yakni kontra-hegemoni. Althusser memiliki pandangan berbeda. Baginya, setiap perlawanan terhadap ideologi (atau hegemoni) selalu merupakan sebetuk ideologi baru. Agama Katolik di Amerika Selatan bisa menjadi contoh yang baik. Sebelumnya, agama Katolik dijadikan pembenaran untuk beragam ketidakadilan disana, yakni diktator militer yang menindas kebebasan rakyat sipil. Namun, agama yang sama juga menjadi alat untuk perjuangan melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Inilah ideologi baru yang disebut sebagai teologi pembebasan. Ideologi ini melawan ideologi lama. Namun, keduanya, menurut Althusser, tetap merupakan sebuah ideologi.

Althusser lebih jauh menegaskan, bahwa ideologi tidak melulu merupakan sesuatu yang abstrak. Sebaliknya, ideologi bisa mengambil bentuk yang amat nyata, misalnya dalam bentuk polisi yang menertibkan masyarakat, atau penjara.²⁶ Tidak hanya itu, ideologi, atau interpelasi, bahkan menciptakan kenyataan sendiri yang mandiri dari kenyataan sosial lainnya. Sekolah dan penjara adalah contoh yang tepat. Keduanya mencabut orang dari kenyataan sosial yang ada, dan membangun kenyataan baru dengan aturan yang berbeda. Dalam banyak hal, agama juga

²³ Lihat (Althusser 1971)

²⁴ Lihat (Althusser 1971)

²⁵ Lihat (Wattimena, Filsafat dan Sains 2008)

²⁶ Lihat (Althusser 1971)

memainkan hal yang sama. Ia memperkenalkan dunia baru dengan nilai dan harapan yang baru pula. Semua ini memiliki satu tujuan, yakni mengontrol perilaku masyarakat luas, agar sesuai dengan struktur kekuasaan yang ada.

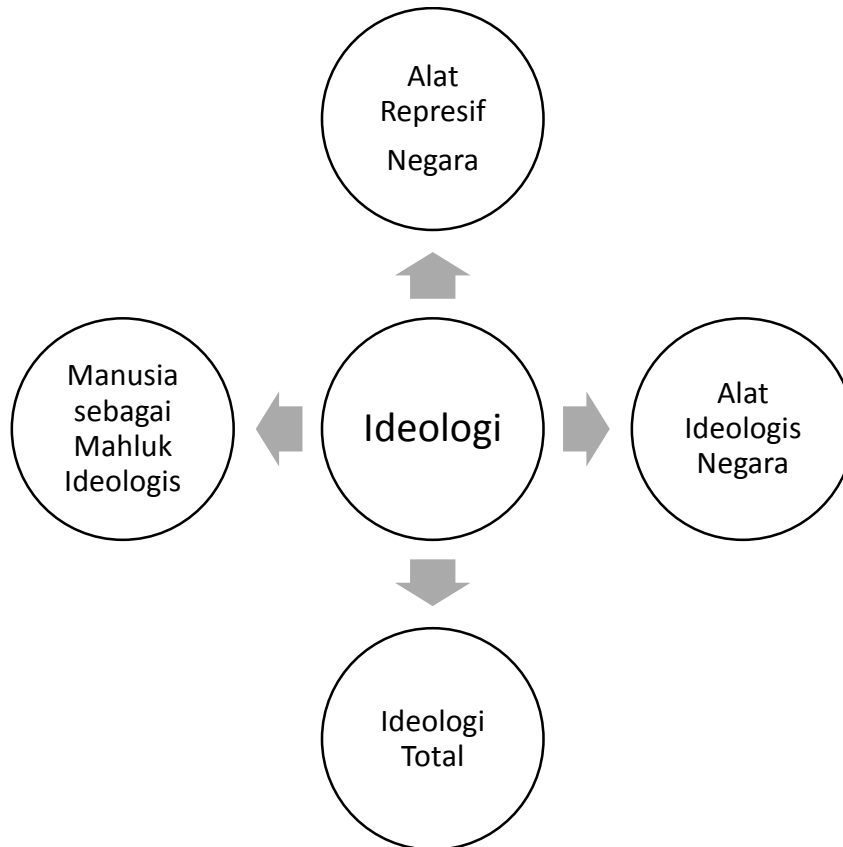
Althusser juga menegaskan, bahwa ideologi tercipta dengan pola memutar. Di satu sisi, negara, melalui alat represif dan ideologisnya, mendorong masyarakat luas untuk menganut ideologi tertentu. Hasilnya adalah pola perilaku dan bahkan ritual yang kemudian membudaya di dalam masyarakat. Di sisi lain, semakin masyarakat menganut dan menerapkan ideologi yang ada, maka semakin kuatlah ideologi berakar. Kekuatan ideologi ini begitu besar, bahkan sampai mempengaruhi kehidupan pribadi warga negara. Pola tercipta dan berkembangnya ideologi ini terkait erat dengan pembentukan struktur sosial suatu masyarakat.²⁷ Bahkan, bisa dikatakan, bahwa, menurut Althusser, tidak ada struktur sosial yang netral. Semuanya adalah ideologi.

Althusser juga melakukan kritik terhadap Marx. Bagi Marx, ideologi adalah hasil dari hubungan-hubungan ekonomi di dalam masyarakat. Artinya, masyarakat dengan sistem ekonomi kapitalisme akan melahirkan ideologi kapitalisme untuk melestarikan dirinya sendiri. Bagi Althusser, pandangan ini tidak tepat. Manusia, secara alami, merupakan makhluk ideologis.²⁸ Tanpa ideologi, orang tidak akan dapat bertindak. Sebaliknya pun juga benar. Ideologi tidak akan berkembang, tanpa keberadaan manusia dan masyarakat. Setiap masyarakat, disadari atau tidak, pasti memiliki ideologi tertentu. Ia tersembunyi di balik agama dan budaya. Ideologi *menciptakan* sekaligus *diciptakan* oleh manusia. Bisa juga dirumuskan, bahwa kajian agama adalah kajian ideologi yang sekaligus merupakan kajian terhadap aktivitas manusia.

²⁷ Lihat (Wattimena, Filsafat dan Sains 2008)

²⁸ (Althusser 1971)

Bagan 3.
Konsep Ideologi Menurut Louis Althusser²⁹



Pemikir lainnya yang banyak berbicara soal ideologi dan kekuasaan adalah Michel Foucault, seorang pemikir Prancis. Memang, ia tak banyak menulis soal agama. Walaupun begitu, konsep-konsepnya, seperti soal kekuasaan, seksualitas, pengetahuan dan penjara, jelas memiliki dampak besar terhadap berbagai kajian soal agama dan budaya. Yang cukup penting diperhatikan adalah pemahaman Foucault soal kekuasaan. Walaupun banyak dipengaruhi oleh Marx, namun Foucault bergerak lebih jauh untuk memahami gerak kekuasaan di dalam kehidupan.³⁰ Ia tidak lagi melihat politik sebagai tempat pertarungan kekuasaan antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja, seperti yang dilakukan oleh Marx. Ia juga tidak memahami kekuasaan

²⁹ Hasil rumusan penulis

³⁰ Lihat (Nye 2008)

sebagai melulu hegemoni ataupun ideologi yang mempengaruhi cara berpikir maupun pola perilaku masyarakat.³¹

Bagi Foucault, kekuasaan adalah aliran wacana yang bekerja di semua sisi kehidupan sosial. Kekuasaan tidak hanya terletak pada institusi-institusi politik yang menjamin kepatuhan masyarakat luas. Bagi Foucault, kekuasaan adalah hubungan-hubungan sosial yang bersifat majemuk. Ia berkembang dalam hubungan antar manusia, dan juga antar sistem sosial. Dengan kata lain, kekuasaan ada di segala tempat, karena ia berasal dari segala tempat pula.³² Kekuasaan bukan hanya sekedar hubungan dua pihak, yakni pihak yang kuat menguasai pihak yang lemah. Kekuasaan adalah jaringan kekuasaan yang muncul dari semua tempat, dan tersebar ke segala arah. Konsep ideologi pun lalu menjadi semakin kompleks.

Pandangan Foucault tentang kekuasaan dapat digambarkan dengan konsep panopticon, yang sebelumnya dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Panopticon adalah tata pengelolaan penjara. Bentuknya melingkar. Ada banyak sel yang melingkari kantor pusat yang berisi penjaga penjara. Dari kantor pusat yang berada di tengah ini, si penjaga penjara bisa mengamati semua sel yang berisi tahanan, tanpa mereka sadari. Ini membuat semua tahanan bisa selalu diamati, tanpa sepengetahuan mereka. Mereka pun selalu dalam keadaan waspada, karena merasa selalu diamati oleh penjaga. Pandangan ini sejalan dengan ajaran agama-agama Timur Tengah, bahwa ada sosok yang selalu mengamati perilaku manusia, bahkan di ruang pribadinya.³³

Kekuatan terbesar panopticon, menurut Foucault, terletak pada kemampuannya untuk memanipulasi pola pikir sekaligus perilaku tahanan. Mereka lalu menjadikan kekuasaan dan penindasan sebagai bagian dari diri mereka sendiri, karena merasa diamati tanpa henti. Mereka harus berpikir dan bersikap, seolah mereka terus diamati oleh penjaga penjara dari pusat penjara. Ini berarti, si tahanan tunduk dan patuh secara alami terhadap penguasa penjara. Mereka terlibat di dalam penindasan yang mereka alami sendiri. Bisa juga dikatakan, bahwa mereka menjadi penjaga bagi diri mereka sendiri.

³¹ Lihat (Foucault 1981)

³² *Ibid.*

³³ Lihat (Nye 2008)

Di dalam masyarakat nyata, peran panopticon diganti oleh pemerintah dengan teknologi mata-matanya. Hal ini mengambil beberapa bentuk, mulai dari penguatan lembaga kepolisian, pengetatan peraturan di lembaga pendidikan, dan pendisiplinan pikiran melalui praktek psikiatri. Semua ini hanya memiliki satu tujuan, yakni mengontrol seluruh masyarakat, agar sejalan dengan kehendak penguasa, baik di tingkat pikiran maupun perilaku. Kehendak penguasa inilah yang disebut sebagai ideologi. Foucault bahkan menegaskan, bahwa ilmu pengetahuan justru merupakan unsur pendukung terkuat dari kehendak penguasa sekarang ini. Tak heran, kekuasaan politik dan ilmu pengetahuan memiliki metode yang sama, yakni pengamatan atau “memata-matai”.³⁴

Inti pandangan Foucault adalah hubungan antara ideologi dan kekuasaan. Keduanya disebarakan melalui beragam jaringan yang ada di dalam hubungan antar manusia, mulai dari keluarga sampai dengan organisasi internasional. Misalnya, ketika saya berjalan ke pusat perbelanjaan, saya langsung diamati kamera CCTV yang terpasang di pintu. Tidak hanya itu, petugas keamanan langsung mengamati gerak gerik saya di tempat parkir. Saya pun harus mengikuti alur berkendara dan berjalan yang ditentukan oleh model bangunan. Sampai di dalam pusat perbelanjaan, saya langsung menjadi obyek manipulasi dari para pekerja toko yang ingin menjual barang mereka dengan segala cara. Jaringan hubungan kekuasaan ini mengontrol cara berpikir dan perilaku saya, sehingga saya menjadi pelanggan mall yang mereka inginkan, yakni tertib dan konsumtif.

Agama juga memainkan peranan di dalam mengawasi gerak gerik masyarakat luas. Di dalam agama Katolik, orang wajib mengaku dosa kepada pemuka agamanya secara berkala. Ini merupakan upaya untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Dalam arti tertentu, ini juga merupakan tindak memata-matai masyarakat luas, supaya bertindak sesuai dengan kehendak dari institusi agama, yang tentunya ditopang oleh penguasa politik. Di dalam agama-agama Timur Tengah, Tuhan pun dilihat sebagai sosok yang terus mengamati dan menilai tindakan dan bahkan pikiran manusia. Ini juga merupakan se bentuk penggunaan kekuasaan panopticon, sehingga orang terus merasa diawasi, walaupun ia sedang sendirian. Hal

³⁴ Dalam (Nye 2008)

ini juga bisa disebut sebagai upaya untuk menginternalisasi kekuasaan melalui agama.

Foucault memang berangkat dari konsep ideologi. Namun, ia berusaha memahami kekuasaan tidak melulu sebagai kekuasaan politis yang tampak dengan jelas, melainkan kekuasaan yang mengalir secara halus dalam hubungan-hubungan sosial di masyarakat. Agama pun memainkan peranannya sebagai alat kekuasaan dalam hubungan-hubungan sosial ini. Semua ini ditempatkan di dalam kerangka berpikir Foucault yang meliputi tiga tema besar, yakni soal kekuasaan, pengetahuan dan wacana. Baginya, pengetahuan dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, pengetahuan menciptakan kekuasaan. Dengan pemahaman politis dan teknologis, kekuasaan dibentuk untuk mengatur cara berpikir dan perilaku orang lain. Di sisi lain, kekuasaan juga menciptakan pengetahuan. Misalnya, kekuasaan seorang guru besar untuk menentukan kebenaran di dalam bidang keilmuannya.

Hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan dijumpai oleh konsep wacana. Dalam arti ini, wacana adalah sebuah “cara untuk berbicara” tentang dunia beserta unsur-unsurnya. Wacana menjadi amat penting, karena manusia berpikir dan berhubungan satu sama lain dengan bahasa. Wacana juga tidak hanya menggambarkan dunia melalui bahasa dan cara berbicara, tetapi juga memberinya makna. Misalnya, jika saya menamai sebuah bangunan sebagai hotel, maka saya hanya akan tidur disana. Bangunan yang sama, jika saya namai sebagai rumah, akan memiliki fungsi yang berbeda. Ia tidak hanya tempat tidur, tetapi juga tempat untuk membangun keluarga. Kata “hotel” dan “rumah” adalah sebetulnya wacana, yakni cara berbicara tentang sesuatu di dunia, sehingga memberinya makna baru. Makna inilah yang mendorong orang untuk bertindak.

Foucault juga menegaskan, bahwa wacana memiliki dua ciri. Yang pertama, wacana membentuk dunia. Ia memberi makna pada dunia, sehingga benda tidak hanya sekedar menjadi benda, melainkan memiliki ciri unik tertentu yang bermakna. Yang kedua, wacana memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang, sehingga mereka bertindak dengan pola-pola tertentu. Kekuatan wacana tidak datang dari dirinya sendiri, melainkan dari hubungan-hubungan kekuasaan yang menciptakannya. Hubungan-hubungan kekuasaan inilah yang disebut Foucault sebagai “rezim kebenaran”. Rezim ini bisa berupa pemerintah, ataupun kelompok-kelompok lain yang berkuasa di suatu masyarakat. Ia berupaya, supaya pandangan-

pandangan lain, yang bertentangan dengan pandangan mereka, akan sulit diterima di masyarakat itu.

Dengan demikian, kekuasaan membentuk wacana, dan wacana lalu membentuk pengetahuan yang memberikan dasar bagi kekuasaan. Misalnya, di abad 21, kapitalisme seolah menjadi satu-satunya tata ekonomi yang cocok bagi seluruh dunia. Para kapitalis lalu melahirkan wacana ekonomi, yakni cara berbicara tentang ekonomi, yang melulu menjadikan kapitalisme sebagai sistem ekonomi terbaik yang ada. Lalu lahirlah ilmu ekonomi dengan paradigma kapitalistik yang diajarkan di berbagai perguruan tinggi dunia. Semua wacana yang bertentangan dengan kapitalisme dianggap lebih rendah. Dengan pola ini, para kapitalis, yakni para pemilik modal, semakin memperkuat kedudukan mereka. Hubungan antara kekuasaan, wacana dan pengetahuan ini bisa juga diterapkan untuk memahami berkembangnya pemahaman lain.

Pola serupa dapat ditemukan di dalam tata politik global. Di abad 21 ini, demokrasi sudah menjadi tata politik utama di berbagai negara. Berbagai bentuk tata politik lainnya dianggap tak lagi memadai. Ini terjadi, dari kaca mata teori Foucault, karena negara-negara kuat menggunakan demokrasi sebagai tata politiknya. Mereka kemudian menciptakan wacana tentang demokrasi di berbagai tempat. Wacana tersebut membentuk berbagai pengetahuan tentang demokrasi, misalnya dalam bentuk kajian ilmiah dan kurikulum di berbagai lembaga pendidikan. Pengetahuan yang tersebar ini lalu menjadi dasar bagi semakin berkembangnya kekuasaan para penguasa yang menggunakan tata politik demokrasi. Kajian ini tentu mengabaikan fakta, bahwa pada dirinya sendiri, demokrasi memang memiliki beberapa kelebihan penting sebagai se bentuk tata politik.³⁵

Ekonomi dan politik tak pernah bisa dilepaskan dari kekuatan wacana. Agama, dalam hubungannya dengan kekuasaan, pun adalah hasil dari wacana para penguasa. Konsep wacana memiliki hubungan erat dengan konsep ideologi di dalam ranah pemikiran Marx. Namun, wacana tidak hanya sekedar kesadaran palsu yang mengaburkan kenyataan, seperti di dalam pemikiran Marx, melainkan lebih luas dan lebih halus dari itu. Kedua konsep tersebut, yakni wacana dan ideologi, mengambil bentuk tindakan dan kata-kata yang diucapkan di dalam keseharian. Ia juga

³⁵ Lihat (Wattimena, *Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya* 2016)

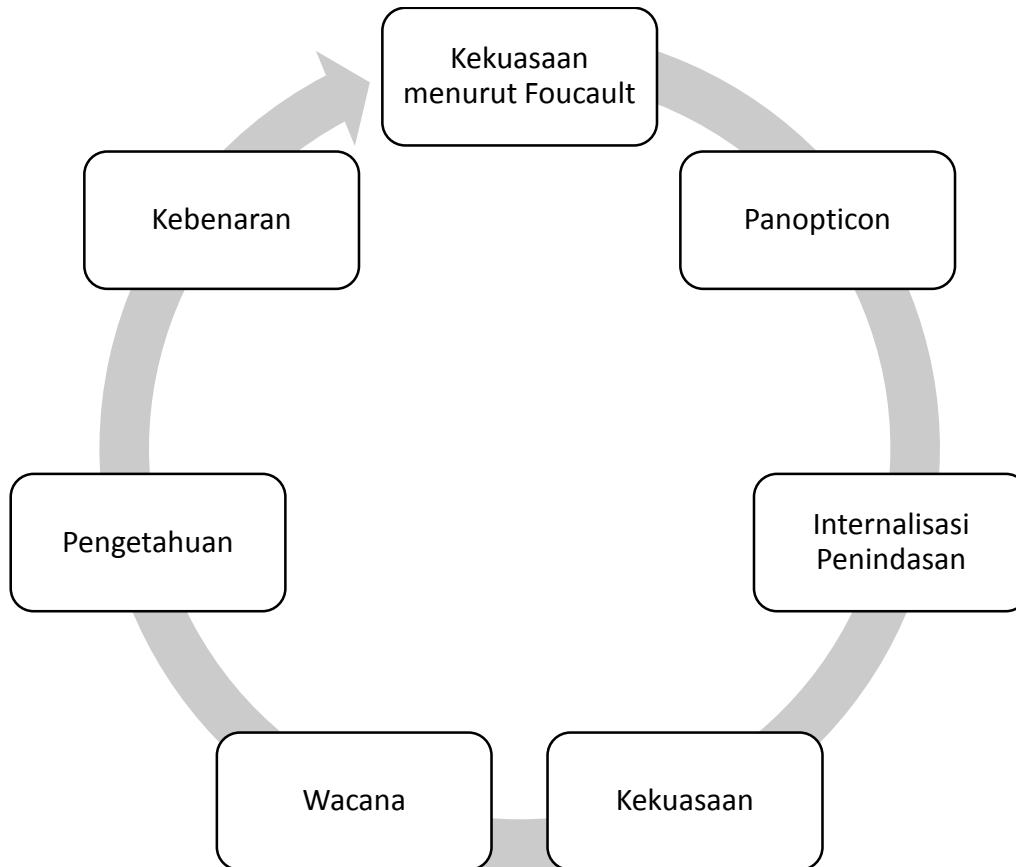
menyentuh benda-benda material, seperti alat-alat produksi dan ekonomi. Cara manusia berpikir tentang dunianya, sekaligus pola perilaku kesehariannya, adalah hasil dari pembentukan dan pelestarian wacana tertentu yang dilahirkan oleh penguasa sebagai “rezim kebenaran”.

Kekuatan dari wacana tampak dalam dua hal. Pertama, ia akan menghukum orang-orang yang berani melawannya, misalnya melalui hukuman penjara, penyiksaan dan bahkan mutilasi. Wacana adalah pelindung kekuasaan. Semua yang melawan kekuasaan sama juga dengan melawan hukum. Kedua, wacana juga bisa menerapkan hukuman dengan cara-cara yang lebih halus, seperti penandaan tubuh, dan bahkan ritual sunat. Semua ini adalah upaya wacana untuk mengatur cara pikir dan perilaku orang, agar sesuai dengan penguasa yang ada. Kepentingan utama dari wacana bukanlah kebenaran, melainkan kontrol. Bahkan, kebenaran pun juga dilihat dari kaca mata wacana yang ada.

Sesuatu dianggap sebagai benar, jika ia cocok dengan wacana yang berkuasa di sebuah masyarakat. Wacana menyediakan bentuk kebenaran tertentu yang kemudian ditelan oleh masyarakat luas sebagai kebenaran yang sudah jelas. Memang, disini, kebenaran yang mutlak dianggap sebagai sesuatu yang tak terjangkau oleh akal dan bahasa manusia. Akan tetapi, dalam hubungan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat, kebenaran adalah sesuatu yang sejalan dengan wacana penguasa yang dibentuk dalam pengetahuan-pengetahuan tertentu.

Bagan 4.³⁶

Kekuasaan Menurut Foucault



Di dalam sejarah, agama selalu bersinggungan dengan kekuasaan. Agama menjadi pembenaran bagi kekuasaan, sekaligus sang penguasa turut mengembangkan agama yang mendukungnya. Dalam arti ini, agama adalah ideologi. Seperti dinyatakan oleh Marx, agama adalah hasil dari hubungan-hubungan ekonomi yang dibentuk oleh penguasa. Lalu, agama menjadi alat pembenaran bagi hubungan-hubungan ekonomi tersebut, sehingga turut mendukung penindasan dan ketidakadilan yang sudah ada. Gramsci dan Althusser melihat, bagaimana orang-orang yang ditindas menginternalisasi penindasan, sehingga mereka melihatnya sebagai normal, bahkan ikut mendukungnya. Foucault melihat pola yang lebih rumit,

³⁶ Bagan adalah hasil rumusan penulis

yakni hubungan antara kekuasaan, wacana dan pengetahuan yang akhirnya membenarkan kekuasaan yang ada.

2. Konteks Indonesia

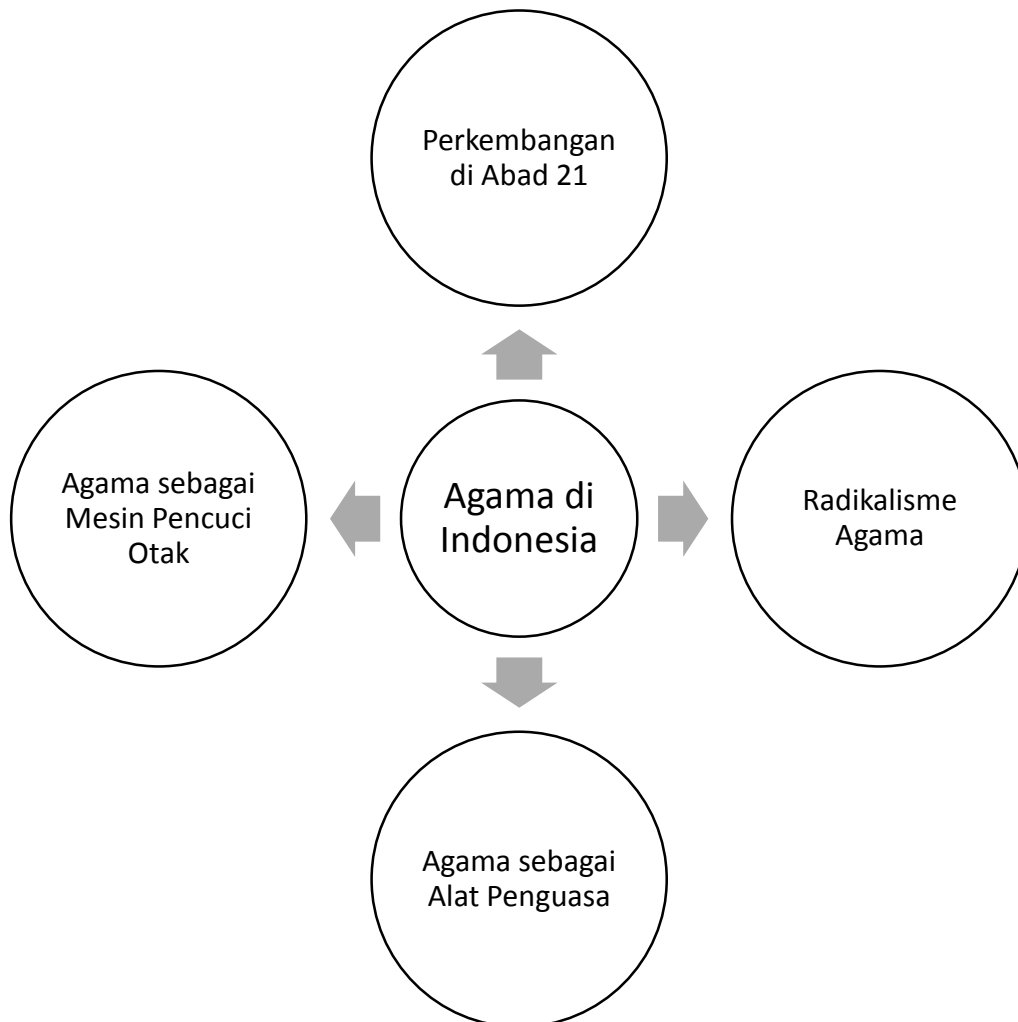
Di awal abad 21 ini, Indonesia dihantam oleh radikalisme agama. Masyarakat dipecah berdasarkan agama-agama tertentu. Konflik dan diskriminasi di berbagai tempat pun tak terhindarkan. Perpecahan terasa di berbagai tempat. Kebencian tercium di udara. Melihat begitu dasyatnya konflik dan diskriminasi yang terjadi, adalah kejaiban, bahwa Indonesia masih ada sebagai satu kesatuan politis yang diakui dunia, dan berada dalam keadaan yang cukup baik, baik di bidang politik, ekonomi maupun budaya.

Berkembangnya radikalisme agama setidaknya berakar pada dua hal. Pertama, masuknya paham asing, dengan dukungan dana yang begitu besar, menjadikan sekelompok agama menjadi sangat radikal, dan mengundang konflik serta tegangan dengan kelompok lainnya. Dua, pemerintah juga dinilai sangat lambat di dalam menanggapi berbagai ancaman radikalisme yang ada dan berkembang di berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Ada kesan sesaat, bahwa pemerintah justru membiarkan radikalisme tersebar, supaya masyarakat hidup dalam perpecahan dan ketakutan, serta diam di hadapan sepak terjang penguasa politik yang penuh korupsi.³⁷

³⁷ Bdk (Wattimena, Filsafat Anti Korupsi 2012)

Bagan 5.³⁸

Agama dan Kekuasaan dalam Konteks Indonesia



Di Indonesia, agama juga digunakan sebagai alat penguasa. Penguasa disini juga bukan hanya pemerintah, melainkan orang-orang yang memiliki sumber daya untuk mempengaruhi hidup banyak orang. Agama digunakan untuk mengumpulkan dan menggerakkan massa untuk tujuan politik. Ketika pemilihan umum tiba, baik di tingkat kepala daerah, legislatif maupun presiden, agama kembali dimainkan untuk mencari dukungan, dan mendulang suara. Hal ini semakin terasa sejak pemilihan kepada daerah Jakarta 2017 lalu, dimana agama digunakan oleh partai politik untuk

³⁸ Bagan adalah rumusan penulis

memecah belah, menciptakan konflik, menciptakan ketidakadilan terhadap Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, mantan Gubernur Jakarta), dan kemudian meraih suara serta dukungan dengan berpijak pada ketakutan.³⁹

Karena kekuataannya mempengaruhi massa yang berpendidikan rendah dalam soal mutu, agama juga digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sejauh hal ini memang mampu meningkatkan mutu kehidupan masyarakat luas, sebenarnya tidak ada masalah. Masalah muncul, ketika agama menjadi alat eksploitasi masyarakat luas, sehingga mereka mengeluarkan uang yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Para pemuka agama lalu menjadi kaya raya, dan bahkan mengingkari kesederhanaan yang merupakan inti dari ajaran semua agama. Hal ini lalu menciptakan kesenjangan sosial yang amat besar di dalam masyarakat Indonesia.⁴⁰

Ketika agama menjadi alat bagi kepentingan politik sempit dan kepentingan kerakusan untuk memperkaya diri, maka agama telah menjadi ideologi. Seperti dinyatakan oleh Marx dan Althusser, ideologi adalah kesadaran palsu yang mengaburkan kebenaran di dalam kehidupan bersama. Ideologi menawarkan pandangan yang salah, lalu dianggap sebagai kebenaran melalui cara-cara yang penuh dengan kebohongan. Ideologi digunakan oleh kelas penguasa untuk menindas, sekaligus untuk mempertahankan kekuasaannya di masyarakat. Cara yang ditempuh adalah penindasan dengan menggunakan kekuatan militer, sekaligus kekuatan ideologis dalam bentuk sekolah, agama dan media massa. Sebagai ideologi, agama telah kehilangan tujuan asalnya, dan menjadi pembenaran bagi kekuasaan semata.

Dalam arti ini jugalah agama menjadi mesin pencuci otak. Agama mampu membuat orang menjadi percaya buta, tanpa sikap kritis sama sekali. Agama mampu mendorong orang untuk berperilaku tidak masuk akal, bahkan jahat terhadap makhluk lain. Agama bisa membuat orang patuh secara buta, tanpa pertanyaan sama sekali. Inilah kekuasaan yang terdapat di dalam inti agama itu sendiri. Perpaduan antara ajaran, ritual dan moralitas membuat agama menjadi penguasa pada dirinya sendiri. Dalam arti ini, ideologi sudah ada di dalam agama itu sendiri, tanpa campur tangan dari kekuasaan politik maupun ekonomi yang tidak jujur. Namun, hal ini juga tidak bisa

³⁹ Lihat (et.al 2017)

⁴⁰ Lihat (Lakner 2016)

menutupi fakta, bahwa agama pun bisa mendorong orang untuk berperilaku luhur dalam hubungan dengan makhluk lain.⁴¹

Belajar dari Foucault, agama menjadi sebetuk wacana yang lahir dari tangan penguasa. Wacana itu menciptakan pengetahuan yang disebarakan melalui beragam institusi pendidikan. Pengetahuan lalu menjadi pembenaran bagi kekuasaan yang ada. Dalam arti ini, kekuasaan memang tidak selalu berwajah jelek. Ada unsur kekuasaan yang mampu menata hidup bersama, sehingga ketertiban dan keamanan bisa tercipta. Agama memainkan peranan penting sebagai wacana di dalam proses itu, yakni kontrol, ketertiban dan keamanan. Tentu saja, ini semua mudah sekali terpeleset ke dalam politik kekuasaan yang menindas, ketika wacana dan pengetahuan yang ada membunuh sikap kritis, yang merupakan inti utama dari pendidikan.⁴²

Semua ini penting untuk dipahami, supaya agama tidak menjadi alat kekuasaan politik ataupun ekonomi semata. Pemahaman akan melahirkan kesadaran yang diperlukan, supaya agama bisa menjalankan peran utamanya, yakni sebagai pembawa perdamaian di dalam hati sekaligus di dalam hubungan antar manusia. Disini lahirlah pemikiran kritis yang menjadi penangkal terhadap segala bentuk cuci otak, terutama yang dilahirkan agama. Dengan pemikiran kritis semacam ini, radikalisme dan fundamentalisme dalam segala bentuknya pun bisa dihindari, baik dalam kehidupan beragama, politik maupun ekonomi. Sejarah manusia sudah penuh dengan perang tak berkesudahan yang dilahirkan oleh radikalisme semacam ini.⁴³

3. Kesimpulan

Di abad 21, agama tidak hancur oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia masih memainkan peranan penting di dalam hidup banyak orang, baik di tingkat pribadi maupun dalam hidup bersama. Agama juga menjadi semakin kompleks, terutama karena semakin majemuknya tafsiran atas ajaran agama yang ada, sekaligus berkembang pula agama-agama baru yang menawarkan cara pandang baru. Maka dari itu dibutuhkan sebuah pemahaman baru yang lebih

⁴¹ Misalnya Zen dalam (Wattimena, Dengarkanlah: Pandangan Hidup Timur, Zen dan Jalan Pembebasan 2018)

⁴² Lihat (Wattimena, Pedagogi Kritis: Pemikiran Henry Giroux Tentang Pendidikan dan Relevansinya untuk Indonesia vol. 28, No. 2 (2018))

⁴³ Soal radikalisme dan terorisme (B. A. Reza A.A Wattimena 2018)

mendalam atas agama, yang melampaui tembok-tembok keilmuan yang ada. pada dirinya sendiri, agama adalah sebetulnya kekuasaan. Ia juga menjadi pembenaran bagi kekuasaan yang ada. Dalam arti ini, agama, sebagaimana diuraikan oleh para pemikir yang diacu di dalam tulisan ini, adalah ideologi. Kritik ideologi adalah sebuah upaya untuk terus menerus membongkar sisi-sisi gelap agama, dan menempatkan agama kembali ke tempatnya yang semestinya di dalam hidup manusia.

Daftar Acuan

- Althusser, Louis. 1971. *'Ideology and ideological state apparatuses', in Lenin and Philosophy*. New York.
- Chomsky, Noam. 2016. *Who Rules the World*. Metropolitan Books.
- et.al, Reza A.A Wattimena. 2017. *Esei-esei Keadilan untuk Ahok*. Kupang.
- Foucault, Michel. 1981. *The History of Sexuality, Volume 1*. Penguin.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selection from Prison Notebooks*. London.
- Harari, Yuval Noah. 2011. *Sapiens: A Brief History of Human Kind*. Harper.
- Karl Marx, Friedrich Engels. 1888. *Manifesto of the Communist Party ditulis ulang dalam Karl Marx: A Reader*. Cambridge.
- . 1888. *On Religion*. Moscow.
- Lakner, Christoph. 2016. "Global Economic Inequality The Implications of Thomas Piketty's Capital in the 21st Century." *Policy Research Working Paper 7776, World Bank Group*.
- Magnis-Suseno, Franz. 1999. *Pemikiran Karl Marx*. Jakarta: Gramedia.
- Nye, Malory. 2008. *Religion: The Basics*. London: Routledge.
- Reder, Michael. 2014. *Religion in säkularer Gesellschaft: Über die neue Aufmerksamkeit für Religion in der politischen Philosophie*. Karl Alber.
- Reza A.A Wattimena, Anak Agung Banyu Perwita. 2017. "Tolerance and Education: Developing Tolerance as a Way of Life in Indonesia." *The Ary Suta Center Series of Strategic Management, July 2017 Volume 38*.
- Reza A.A Wattimena, Bustanul Arifin. 2018. "Melampaui Terorisme: Pendekatan Komprehensif untuk Memahami dan Menangkal Terorisme." *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta* 1 (1).
- Wattimena, Reza A.A. 2017. "'Wake Up and Live": The Roots of Cosmopolitanism in Oriental Worldview." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- . 2016. *Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- . 2018. *Dengarkanlah: Pandangan Hidup Timur, Zen dan Jalan Pembebasan*. Jakarta: Karaniya.
- . 2012. *Filsafat Anti Korupsi*. Yogyakarta: Kanisius.
- . 2008. *Filsafat dan Sains*. Jakarta: Grasindo.

- . 2007. *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wattimena, Reza A.A. vol. 28, No. 2 (2018). "Pedagogi Kritis: Pemikiran Henry Giroux Tentang Pendidikan dan Relevansinya untuk Indonesia." *Jurnal Filsafat UGM*.
- . 2019. *Rumah Filsafat*. Januari. <https://rumahfilsafat.com/2019/01/15/pengakuan-seorang-marxis-zennist/>.
- . t.thn. *Rumah Filsafat*. Diakses Agustus 2018. <https://rumahfilsafat.com/2018/08/06/merobohkan-tembok-tembok-keilmuan/>.
- Wattimena, Reza A.A. July 2018 Volume 42. "What are the Fundamental Pillars of Contemporary Globalization?" *THE ARY SUTA CENTER SERIES ON STRATEGIC MANAGEMENT*.
- . 2016. *Zwischen kollektivem Gedächtnis, Anerkennung und Versöhnung*. München.